



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PETERNAKAN

Jalan Veteran – Fatulull, Telp/Faks. 0380-826250,
Email: websitodisnak@gmail.com
KUPANG

Nomor : Disnak.524.050/0g/PDE/III/2025
Lampiran : ---
Perihal : Pengajuan Person In
Charge (PIC) Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) pada
Dinas Peternakan Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Kupang, 26 Maret 2025
Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di –
Kupang.-

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional aplikasi Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Person in Charge (PIC) pengelola aplikasi guna mendukung PPID utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada www.ppidutama.nttprov.go.id sebagai berikut :

1. Nama : Ir.Agustinus Salean
NIP : 196708231995031003
Pangkat/Gol : Pembina/ IV.a
Jabatan : Sekretaris Dinas
2. Nama : Jacob Oktavianus Adoe, S.Pt
NIP : 196810082000121004
Pangkat/Gol : Penata Tingkat II/ III.d
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
3. Nama : Ade Irma Suryani Nainggolan
NIP : 198707262022022001
Pangkat/Gol : Penata Muda / III.a
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Demikian disampaikan dan atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih

Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Ir. Yohanes Oktovianus, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196610291994031007

PARAF HIERARKI	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PUBLIK DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Grand Design Pengembangan Peternakan Provinsi NTT Tahun 2021 – 2028	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Setiap Saat	2021	Hard copy dan soft copy	20 tahun
2	Rencana Kerja Badan Publik Dinas Peternakan Tahun 2025	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
3	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
4	Sistem Informasi REncana Umum Pengadaan 2025	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
5.	LAPORAN LHKPN DAN LHKASN BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
6.	PERJANJIAN KINERJA BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
7.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
8.	LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
9..	Standar Operasional Prosedur Badan Publik	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
10.	Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat	Setiap saat	2025	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
11.	LAPORAN KEUANGAN	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan
12.	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Tahunan

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi		Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arslp
13.	STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2025	Hard copy dan soft copy	Permanen
14	PROFIL BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat	Setiap saat	2025	Hard copy dan soft copy	20 Tahun
15.	Aplikasi Media Sosial Badan Publik (facebook, youtube, twitter, Instagram, tiktok)	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Setiap saat	2025	Hard copy dan soft copy	Permanen

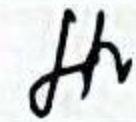
Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ir. Yohanes Oktovlanus,MM

Pembina Utama Madya

NIP.19661029199403100

PARAF HIERARKI	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan publik		Jangka waktu
			dibuka	ditutup	
1	Dokumen terkait Hukuman Disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Akan mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	selama yang bersangkutan menjadi ASN
2	Biodata pegawai.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Menjaga privasi.	selama Undang-Undang berlaku
3	Hasil ujian kompetensi pegawai kontrak/Non PNS.	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Mengungkap data pribadi yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan/kebijakan	Menjaga privasi/ mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
4	Laporan keuangan yang belum diaudit.	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Informasi belum terjamin kebenarannya.	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose ke masyarakat.	Sampai dengan proses audit selesai.
5	Rekening Bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 1 dan 6. UU No. 10 tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai menyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No.14/2008 pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan rekening bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.	Selama rekening masih digunakan.
6	Kode Aplikasi Elektronik	Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan Data terjaga dengan baik dan tidak diretas oleh pihak yang tidak bertanggung	selama berlaku

No.	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/pertimbangan publik		Jangka waktu
			dibuka	ditutup	
7	Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.	Sampai diterbitkannya SK.
8	Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah.
9	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66.	Muncul persaingan usaha tidak sehat.	Dapat menjaga objektivitas penilaian.	Selama proses pengadaan barang dan jasa
10	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66. Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif.	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang	Selama proses pengadaan barang dan jasa

Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

R. Soanes Oktovianus, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196610291994031007

PARAF HIERARKI	
Perencana Ahli Muda	dh
Penelaah Teknis Kebijakan	A